BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Bogor

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Padjajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampong seperdi dikenal dengan Lawanggintung, LawangSaketeng, Jerokuta, Baranangsiang, dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibokota Padajajaran terletak di Kota Bogor.

Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Padjajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatannya pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.

Sebagai akibat penyerbuan tentara Banten ke Pakuan Padjajaran catatan mengenai Kota Pakuan tersebut hilang, baru terungkap kembali setelah datangnya rombongan ekspedisi orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687, dan mereka meneliti prasati Batutulis dan situs-situs lainnya yang meyakini bahwa di Bogor terletak pusat pemerintahan Pakuan Padjajaran.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan *Batavia* dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang.

Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnofasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya, beliau juga mempekerjakan seorang *Planner* yang bernama Carsens yang menata bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzoorg.

Setelah pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbutlah undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus system pemerintahan tradisional diganti dengan system administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah :

1. *Gemeente Batavia* (S. 1903 No.204)
2. *Gemeente Meester Cornelis* (S. 1905 No.206)
3. *Geemente Buitenzoorg* (S. 1905 No. 208)
4. *Geemente Bandoeng* (S. 1906 No.121)
5. *Geemente Cirebon* (S. 1906 No.122)
6. *Geemente Soekabumi* (S. 1914 No.310)

(*Regerings almanac Voor Nederlandsh Indie* 1928 : 746-748)

Pembentukan *Geemente* tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat

golongan Eropa dan dipersamakan (yang menjadi *Burgermeester* dan *Staatsgemeente Buitenzoorg* selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang bumiputera yaitu Mr. Soebroto).

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada, maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No.216), sehingga pada tahun 1922 terbentuklah *Regents chaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi Kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79).

Propinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad 1924 No.378 bij Propincie West Java*) yang terdiri dari lima keresidenan, 18 kabupaten dan Kotapraja, dimana *Buitenzoorg* menjadi salah satu Kotapraja di Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad 1905 No.208 jo. Staatsblad 1926 Bo.368*), dengan prinsip desentralisasi modern, dimana kedudukan *Burgermeester* menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 1965 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dirubah menjadi Kota Bogor.

1.2 Visi dan Misi Kota Bogor

1.2.1 Visi Kota Bogor 2010-2014

"Kota Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia Produktif dan Pelayanan Prima"

1.2.2 Misi Kota Bogor 2010-2014

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.
2. Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan public dan partisipasi masyarakat.

1.3 Logo dan Arti Lambang Kota Bogor

1.3.1 Logo Kota Bogor

Gambar 1.1

Logo Kota Bogor



Sumber : www.kotabogor.go.id

1.3.2 Arti Lambang Kota Bogor

Terdapat warna-warna : emas, merah, biru, dan hijau.

Arti tiap lambing :

- Kiri atas, Burung Garuda kuning emas merupakan Lambang Negara

- Kanan atas, di Kota Bogor terletak Istana Bogor yang dinyatakan dengan lukisan Istana Bogor warna perak
- Kiri bawah, Kota Bogor tak dapat dilepaskan dari bayangan Gunung Salak, dilukis dalam symbol gunung dengan empat buah puncaknya.
- Kota Bogor adalah suatu pusaka dari Kerajaan Padjajaran, hal ini dilukiskan dengan bentuk Kujang.

1.4 Slogan Kota Bogor

Kota Bogor : Tegar Beriman

Merupakan singkatan dari : Tertib, Segar, Bersih, Indah, dan Nyaman

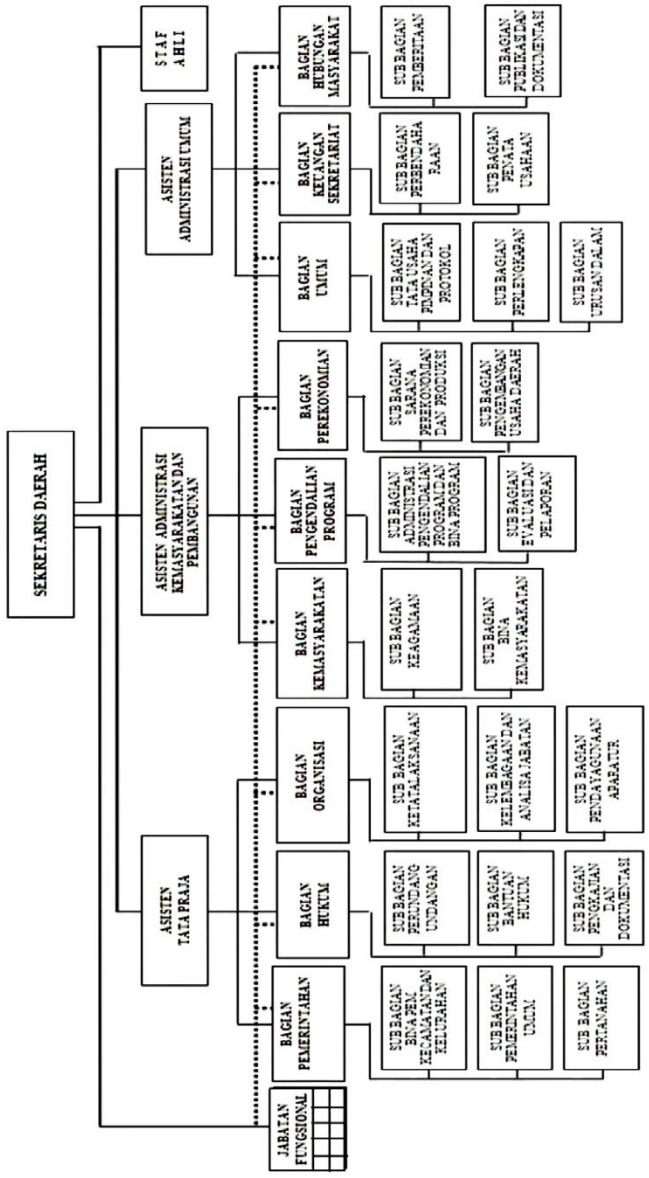
1.5 Sejarah Sekretariat Daerah Bidang Kemasyarakatan Kota Bogor

Sekretariat Daerah Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 7.

Ayat 7 : Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dan dilanjut dengan Paragraf 1 Pasal 18 mengenai Bagian Kemasyarakatan. Pasal 19 mengenai Sub Bagian Keagamaan, dan Pasal 20 mengenai Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.

1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor

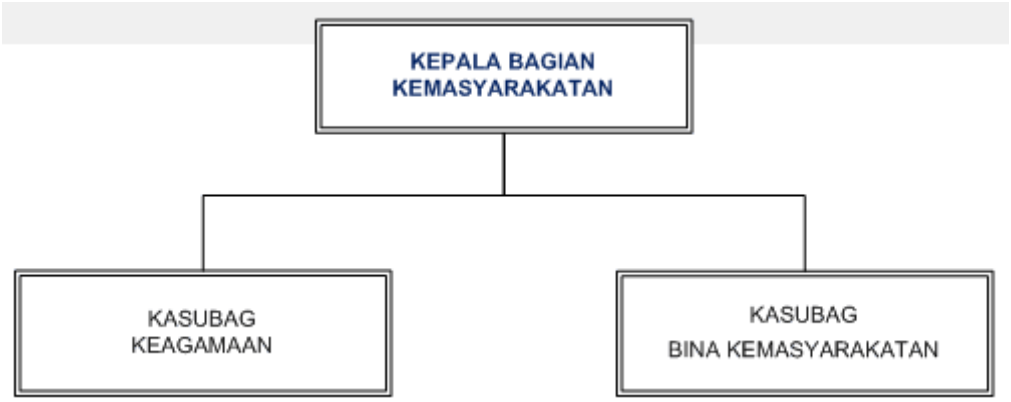


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor

sumber : www.kotabogor.go.id

1.7 Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah Bidang Kemasyarakatan



Sumber : Data Sekretariat Daerah Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor

1.8 *Job Descriptions* dan Pejabat Bagian

1.8.1 Job Description

Tugas Pokok Umum :

Melaksanakan sebagian fungsi Asisten dan Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan di bidang kemasyarakatan.

Fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kemasyarakatan.
- Perumusan draft kebijakan di bidang kemasyarakatan.
- Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kemasyarakatan yang meliputi keagamaan dan bina kemsyarakatan.
- Penyelenggaraan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan kemasyarakatan.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan

Sub Bagian Keagamaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian fungsi Bagian Kemasyarakatan dalam hal mengelola administrasi pembinaan mental, spiritual, dan agama.

Fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan keagamaan.
- Perumusan draft kebijakan kegiatan keagamaan.
- Pengkoordinasian kegiatan di bidang keagamaan.
- Pelaksanaan administrasi pembinaan mental, spiritual dan agama.
- Penyelenggaraan administrasi dan pendokumentasian kegiatan keagamaan.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan

Sub Bagian Bina Kemasyarakatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian fungsi Bagian Kemasyarakatan dalam hal mengelola administrasi peningkatan dan pengembangan kemasyarakatan.

Fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang bina kemasyarakatan
- Perumusan draft kebijakan kegiatan bina kemasyarakatan
- Pengkoordinasian kegiatan di bidang bina kemasyarakatan
- Penyelenggaraan administrasi dan pendokumentasian kegiatan.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan

1.8.2 Pejabat Bagian

Kepala Bagian : Dodi Achdiat, S.Sos

Kasubag Keagamaan : Faisal, S.IP

Kasubag Bina Kemasyarakatan : Adi Novan, S.STP

1.9 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Bidang Kemasyarakatan Kota Bogor

Letak ruangan Sekda Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor berada di lingkungan Kantor Pemerintah Kota yang lebih akrab disebut Balaikota Bogor, tepatnya di Gedung Perangkat Daerah belakang Gedung Balaikota itu sendiri lantai dua.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di ruangan Sekretariat Daerah Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor guna menunjang kerja, seperti yang ada di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Sarana Dan Prasarana
Sekretariat Daerah Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Ruang Kepala Sekda BagianKemasyarakatan	1
2.	Ruang Kasubag Keagamaan	1
	Ruang Kasubag Bina Kemasyarakatan	1
	Ruang Staf	1
	Meja dan Sofa Tamu	1
	Meja	19
	Kursi	24
	Komputer	6
	Telepon	2
	Mesin Fax	1
	Mesin Tik	5
	Lemari Arsip	3

	Papan Pemberitahuan	1
	Printer	2

Sumber : Arsip penulis 2012

1.10 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.10.1 Lokasi

Praktek Kerja Lapangan Dilakukan di Pemerintah Kota Bogor yang berada di :

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 10

Provinsi : Jawa Barat, Indonesia

Telepon : (0251) 8321075

Email : kominfo@kotabogor.go.id

1.10.2 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilakukan selama 30 hari (satu bulan), dimulai pada tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012 di Sekretariat Daerah Bagian Kemasyarakatan Kota Bogor, setiap hari Senin s.d Jumat mulai pukul 08.00 s.d 15.00.